

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat	9
1.5 Metode	10
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	15

1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II PROSEDUR PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA		
TERORISME BERDASARKAN PRINSIP <i>FAIR TRIAL</i>		
2.1	Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	17
2.1.1	Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana berdasarkan KUHAP	18
2.1.2	Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Anti Terorisme.....	21
2.1.3	Eksistensi Laporan Intelijen dan Bukti Permulaan Yang Cukup.....	25
2.2	Prinsip <i>Fair Trial</i> dalam Perbuatan Penangkapan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme	30
BAB III PERBUATAN PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU		
YANG MENGESAMPINGKAN PRINSIP <i>FAIR TRIAL</i>		
3.1	Legitimasi Tindakan Negara Mengesampingkan Prinsip <i>Fair</i> <i>Trial</i>	39
3.2	Perbuatan Penangkapan Yang Berimplikasi Tindak Pidana	44
BAB IV PENUTUP		
57		
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran	58
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/22/VI/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30/VI/2003 tentang Organisasi Dan Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri